



PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI GURU TPQ DI SURABAYA

Mellysa Rahmalia Putri¹, Kustini Kustini²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

e-mail: 23012010168@student.upnjatim.ac.id¹ kustini.ma@upnjatim.ac.id²

Diterima: 1/1/2026; Direvisi: 7/1/2026; Diterbitkan: 15/1/2026

ABSTRAK

Perlindungan sosial bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai pekerja informal masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya literasi jaminan sosial dan keterbatasan akses terhadap program perlindungan negara. Pengabdian ini bertujuan menganalisis peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi guru TPQ di Surabaya melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan, telaah dokumen, serta observasi tidak langsung terhadap alur sosialisasi dan mekanisme pendaftaran. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi berjenjang kepada PAC FKPQI dan kepala TPQ, dengan materi mencakup manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), prosedur klaim, serta tata cara pelaporan. PAC berperan sebagai narahubung dalam pendataan dan koordinasi pelaporan melalui grup komunikasi. Pemerintah Kota Surabaya turut memperkuat program melalui pendanaan APBD sehingga seluruh guru TPQ mendapatkan perlindungan tanpa beban biaya. Program ini terbukti meningkatkan rasa aman, akses perlindungan, dan kepastian manfaat bagi guru TPQ dan ahli waris. Pengabdian menyimpulkan bahwa kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan, PAC, dan pemerintah daerah efektif memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Kata Kunci: *BPJS Ketenagakerjaan, Guru TPQ, Perlindungan Sosial*

ABSTRACT

Social protection for Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) teachers, categorized as informal workers, still faces challenges, particularly related to low social security literacy and limited access to formal state protection programs. This study aims to analyze the role of the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) in enhancing social protection for TPQ teachers in Surabaya through educational activities, community outreach, and multi-stakeholder collaboration. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through in-depth interviews with BPJS Ketenagakerjaan officials, document review, and indirect observation of the socialization process and registration mechanism. The findings indicate that BPJS Ketenagakerjaan conducted tiered socialization to PAC FKPQI and TPQ heads, delivering materials covering the benefits of Employment Injury Insurance (JKK) and Death Benefits (JKM), claim procedures, and reporting mechanisms. PAC served as a key liaison in data collection and coordination of reporting through communication groups. The Surabaya City Government also strengthened the program through APBD funding, ensuring all TPQ teachers received protection without any cost burden. This program was proven to enhance a sense of security, access to protection, and benefit certainty for TPQ teachers and their





beneficiaries. The study concludes that the collaboration between BPJS Ketenagakerjaan, PAC, and the local government is effective in expanding social protection for informal workers.

Keywords: *Social Security, TPQ Teachers, Informal Worker Protection*

PENDAHULUAN

Perlindungan sosial merupakan pilar fundamental yang sangat esensial dalam arsitektur pembangunan negara guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam konteks keindonesiaan, skema perlindungan sosial ditempatkan sebagai strategi utama pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan struktural dan kerentanan ekonomi, di mana intervensi kebijakan difokuskan secara masif pada penyediaan jaring pengaman berupa bantuan sosial, pelayanan sosial terpadu, serta asuransi sosial. Di tengah dinamika pasar tenaga kerja yang fluktuatif, kelompok pekerja informal muncul sebagai segmen populasi yang berada dalam posisi paling rentan dan sangat membutuhkan proteksi negara. Hal ini disebabkan karena mayoritas pekerja di sektor informal beroperasi tanpa adanya kontrak kerja yang formal, memiliki pendapatan yang tidak menentu, serta tidak memiliki akses yang memadai terhadap standar upah yang layak maupun jaminan sosial. Dalam kerangka urgensi inilah, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai instrumen vital negara untuk memastikan bahwa seluruh spektrum tenaga kerja, tanpa terkecuali mereka yang berada di sektor informal, dapat memperoleh hak konstitusional mereka atas jaminan sosial demi menjaga martabat kemanusiaan mereka (Izyati et al., 2023; Sudrajat, 2020).

Salah satu kelompok pekerja informal yang memiliki peran strategis namun sering kali luput dari perhatian dalam diskursus ketenagakerjaan adalah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Secara karakteristik pekerjaan, mereka termasuk dalam kategori pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah, meskipun kontribusi mereka sangatlah monumental dalam pembangunan fondasi moral, nilai keagamaan, dan pembentukan karakter generasi muda bangsa. Tantangan struktural yang dihadapi oleh para Guru TPQ ini cukup kompleks, mencakup isu kurangnya pengakuan formal terhadap profesi mereka sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, serta minimnya insentif finansial maupun dukungan regulasi dari pemerintah. Padahal, dalam menjalankan tugas mulia mereka, guru TPQ tidak lepas dari berbagai risiko kerja yang nyata, mulai dari risiko kecelakaan lalu lintas saat perjalanan menuju lokasi mengajar, hingga risiko lain yang mungkin terjadi saat terlibat dalam kegiatan keagamaan atau acara komunitas (Afwadzi et al., 2023; Sibagariang et al., 2024). Oleh karena itu, kebutuhan terhadap skema perlindungan sosial bagi entitas pendidik keagamaan ini menjadi semakin mendesak dan strategis untuk segera direalisasikan demi menjamin ketenangan kerja mereka (Hafizd, 2023; Islakh et al., 2025; Parnawi et al., 2024).

Meskipun urgensi perlindungan sangat tinggi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pekerja informal, termasuk guru TPQ, terhadap program BPJS Ketenagakerjaan masih tergolong rendah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) telah memberikan payung hukum untuk pemberian manfaat uang tunai dan pelayanan kesehatan, namun hambatan di tingkat akar rumput masih sangat kuat. Rendahnya pemahaman akan prosedur, kurangnya kesadaran akan risiko kerja, serta minimnya pengetahuan mendalam mengenai manfaat jangka panjang program jaminan sosial masih menjadi masalah mendasar. Sikap enggan atau apatis pekerja sektor informal untuk mendaftar sering kali diperkuat oleh keterbatasan literasi digital serta persepsi bahwa proses birokrasi yang harus dilalui sangat rumit dan berbelit-belit. Kondisi ketidaktahuan ini juga dialami secara masif oleh para guru TPQ, yang umumnya lebih banyak



mengandalkan informasi dari mulut ke mulut dalam komunitas terdekat mereka, dibandingkan mencari informasi yang valid dari kanal komunikasi resmi pemerintah (Hariyadi et al., 2022; Hasanah & Hamdan, 2021; PRIMAYEKTI et al., 2024).

Untuk mengatasi hambatan partisipasi tersebut, kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi strategi kunci untuk menjangkau kelompok rentan yang sulit tersentuh mekanisme pasar biasa. Pemerintah Kota Surabaya muncul sebagai salah satu contoh pemerintah daerah yang berhasil menerapkan model terobosan perlindungan sosial berbasis komunitas keagamaan melalui intervensi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan afirmatif ini sangat selaras dengan konsep *Social Protection Floor* (SPF) yang didefinisikan oleh organisasi buruh internasional sebagai jaminan standar minimum kesehatan esensial dan pendapatan dasar bagi semua warga negara yang membutuhkan. Pada praktiknya, akses universal terhadap jaminan sosial sering terhambat oleh faktor ketidakmampuan ekonomi pekerja informal untuk membayar iuran secara mandiri. Oleh karena itu, efektivitas konsep *Social Protection Floor* sangat bergantung pada kemauan politik dan peran aktif pemerintah daerah dalam menanggung biaya iuran tersebut. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mendanai iuran Guru TPQ merupakan implementasi nyata yang secara efektif menghapus hambatan ekonomi dan menjamin hak dasar mereka terpenuhi.

Berdasarkan penelusuran data dan wawancara di lapangan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa telah merespons kebijakan daerah tersebut dengan melaksanakan sosialisasi berjenjang yang intensif sejak pertengahan tahun 2024. Sosialisasi ini ditargetkan kepada struktur Pengurus Anak Cabang (PAC) Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an Indonesia (FKPQI) dan kemudian diteruskan kepada kepala-kepala unit TPQ di seluruh wilayah. Langkah ini menunjukkan penerapan strategi komunikasi langsung dan interaktif, yang terbukti lebih efektif dibandingkan metode pasif. Pendekatan tatap muka melalui pemaparan materi dan diskusi terbuka mampu menciptakan kesadaran kolektif yang tinggi serta memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam ekosistem ini, PAC memiliki peran sentral sebagai jembatan penghubung atau narahubung antara institusi BPJS Ketenagakerjaan dengan unit-unit TPQ di bawahnya. Peran krusial mereka meliputi proses pendataan peserta, penyebaran informasi terbaru, hingga pendampingan pelaporan administrasi jika terjadi kasus kematian atau kecelakaan kerja yang menimpa para guru.

Pelaksanaan strategi sosialisasi tersebut didukung secara optimal oleh penggunaan berbagai instrumen media edukatif yang variatif, mulai dari penyebaran brosur informatif, materi presentasi yang menarik, penyebaran *flyer* digital dan fisik, serta kegiatan seremonial penyerahan santunan secara langsung kepada ahli waris guru TPQ yang mengalami musibah. Pendekatan visual dan bukti nyata ini menegaskan bahwa penggunaan media edukatif sangatlah esensial untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan terpercaya kepada publik. Hal ini menjadi kunci utama untuk mengikis keraguan, meningkatkan pemahaman, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program jaminan sosial. Selain itu, kegiatan penyerahan klaim santunan yang dilakukan secara simbolis pada momen-momen publik yang sakral, seperti pada peringatan Hari Santri, berfungsi strategis untuk memperkuat persepsi positif masyarakat. Momen ini menjadi bukti konkret kehadiran negara di tengah masyarakat religius, membangun kepercayaan publik bahwa program perlindungan ini benar-benar memberikan manfaat nyata dan bukan sekadar janji manis birokrasi semata.

Berangkat dari berbagai temuan empiris dan dinamika pelaksanaan program di atas, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana BPJS





Ketenagakerjaan menjalankan peran strategisnya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi guru TPQ di Surabaya. Pengabdian ini dirancang dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif peran BPJS Ketenagakerjaan dalam aspek edukasi, metode sosialisasi, mekanisme pendaftaran, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dengan PAC FKPQI dan Pemerintah Kota Surabaya. Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang nyata terhadap literatur perlindungan sosial pekerja informal, khususnya yang menyoroti sektor pendidikan keagamaan yang selama ini masih jarang tersentuh oleh pengabdian ilmiah. Lebih jauh lagi, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi model implementatif atau *best practice* yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan maksimal bagi para pendidik keagamaan di wilayahnya masing-masing.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, mendalam, dan alamiah mengenai implementasi program perlindungan sosial bagi pekerja informal di sektor keagamaan. Metode ini dipilih secara strategis karena kemampuannya dalam membedah fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait dinamika mekanisme kolaborasi antar-lembaga dalam memberikan jaminan sosial yang inklusif. Lokasi pengabdian dipusatkan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa, yang bertindak sebagai koordinator utama operasional program perlindungan Guru TPQ yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus analisis diarahkan secara tajam pada empat dimensi strategis, yaitu alur sosialisasi berjenjang yang diterapkan kepada komunitas, mekanisme pendataan kolektif peserta yang melibatkan ribuan guru, prosedur pelaporan klaim manfaat, serta pola hubungan kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Anak Cabang (PAC) FKPQI, dan Pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memotret realitas lapangan secara utuh, mulai dari tahap perencanaan kebijakan hingga eksekusi teknis perlindungan di tingkat akar rumput.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber yang menggabungkan data primer dan sekunder secara ketat untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur kepada informan kunci yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Informan utama yang dipilih adalah Petugas Administrasi Kepesertaan Program Khusus di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa, yang memiliki otoritas, kompetensi teknis, dan keterlibatan langsung dalam seluruh alur operasional program. Selain wawancara, peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder melalui telaah dokumen internal yang relevan, meliputi laporan kegiatan sosialisasi, rekapitulasi data kepesertaan, serta arsip visual dokumentasi penyerahan santunan. Proses ini diperkuat dengan metode observasi tidak langsung terhadap ekosistem digital, yakni dengan memantau alur koordinasi dan pola komunikasi yang terjalin antara petugas BPJS dan perwakilan PAC FKPQI dalam grup komunikasi, khususnya dalam aspek responsivitas penanganan pelaporan kasus risiko kerja dan pembaruan status kepesertaan secara berkala.

Tahapan analisis data dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berjalan secara simultan dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti melakukan proses seleksi ketat, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari catatan



lapangan serta transkrip wawancara agar fokus pada esensi permasalahan. Data yang telah direduksi kemudian masuk ke tahap penyajian data, yang disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang logis untuk menggambarkan alur program secara kronologis dan tematik, memudahkan pemahaman terhadap pola kerja yang terbentuk. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti memaknai temuan data untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas peran BPJS Ketenagakerjaan. Kesimpulan ditarik dengan melihat pola hubungan kausalitas dan konsistensi data, guna merumuskan sebuah model implementasi perlindungan sosial yang efektif dan berpotensi untuk direplikasi oleh pemerintah daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi perlindungan sosial bagi Guru TPQ di Kota Surabaya merupakan sebuah inisiatif terstruktur yang dieksekusi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui unit fungsional Program Khusus, sebuah divisi yang secara spesifik memiliki mandat dan kompetensi untuk membidangi kepesertaan dengan skala mikro kecil serta sektor informal yang tersebar. Peluncuran program ini didasarkan pada kesadaran institusional yang mendalam bahwa Guru TPQ, terlepas dari sifat profesi mereka yang berbasis keagamaan, tetap merupakan kelompok pekerja rentan yang memerlukan perlindungan mendasar berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), selayaknya profesi informal lainnya yang diakui dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang jaminan sosial yang berlaku, menjamin kepastian masa depan mereka.

Proses edukasi dan sosialisasi program dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat yang terencana dan sistematis, secara resmi dimulai pada paruh kedua tahun 2024 pertengahan setelah koordinasi internal rampung. Target awal edukasi difokuskan kepada 31 Pengurus Anak Cabang (PAC) FKPQI yang tersebar di seluruh kecamatan di Surabaya. Penetapan PAC FKPQI sebagai *Person in Charge* (PIC) utama adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa informasi mengenai manfaat, prosedur kepesertaan, dan urgensi perlindungan dapat disalurkan secara terpusat, namun terdistribusi secara efektif ke seluruh wilayah operasional mereka melalui jejaring komunikasi keagamaan yang sudah terbangun solid.

Setelah perwakilan PAC tereduksi secara komprehensif mengenai seluk beluk program, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan kegiatan sosialisasi lanjutan dengan mengundang Kepala TPQ dari kecamatan-kecamatan yang telah menyatakan kesiapan berkoordinasi. Pendekatan yang digunakan dalam proses ini terbukti sangat adaptif dan luwes; temuan wawancara mengungkapkan bahwa acara-acara informal, seperti kegiatan buka puasa bersama, juga dimanfaatkan sebagai langkah awal atau penajakan (*preliminary steps*). Metode non-birokratis ini sengaja dipilih untuk menciptakan suasana yang lebih akrab, secara efektif mengurangi potensi ketegangan dan jarak birokrasi, sehingga memudahkan pengenalan pentingnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada komunitas keagamaan yang menjunjung tinggi tradisi informal dan kepercayaan personal.

Peran PAC FKPQI meluas secara substansial melampaui fungsi penyaluran informasi semata. Mereka mengambil peran sentral sebagai narahubung strategis yang menjalankan fungsi pendampingan administratif yang sangat esensial di tingkat akar rumput. PAC ditugaskan untuk mengoordinasikan pendataan Guru TPQ di tingkat TPQ masing-masing, serta memberikan asistensi langsung kepada Guru yang menghadapi kesulitan dalam pengisian formulir, memastikan kelengkapan dan validitas data yang disyaratkan oleh BPJS





Ketenagakerjaan sebelum diajukan ke kantor cabang oleh Petugas Administrasi Kepesertaan Program Khusus.

Militansi edukasi dan koordinasi yang kuat yang dijalankan oleh PAC inilah yang menjadi faktor kunci utama keberhasilan proses pendataan kolektif berskala besar. Proses yang intensif dan masif ini, yang melibatkan 18.000 peserta Guru TPQ di seluruh kota Surabaya, berhasil diselesaikan secara administrasi dan input kepesertaan rampung secara sistematis pada bulan Oktober 2024. Keberhasilan penyelesaian pendataan kolektif dalam periode waktu yang relatif singkat ini merupakan pencapaian signifikan yang membuktikan efektivitas model pendampingan berbasis komunitas dalam mengatasi hambatan teknis yang dihadapi oleh pekerja informal yang tersebar dan sulit dijangkau.

Dukungan finansial penuh program ini telah terkonfirmasi berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya, sebuah fakta yang menunjukkan komitmen fiskal yang luar biasa dan berkelanjutan. Konfirmasi ini menegaskan bahwa program perlindungan ini dirancang agar tidak membebani iuran bulanan peserta Guru TPQ sedikit pun, yang merupakan hasil pengajuan yang disetujui Pemkot. Dukungan APBD ini menjadi penentu mutlak keberhasilan dan keberlanjutan program, karena secara total menghilangkan hambatan biaya iuran, yang seringkali merupakan kendala terbesar bagi keberlanjutan perlindungan pekerja informal.

Keputusan untuk menggunakan pendanaan melalui APBD ini, menurut informasi yang diperoleh dari wawancara kunci, muncul sebagai hasil dari kesadaran kolektif Pemerintah Kota Surabaya akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap profesi Guru Ngaji/TPQ. Profesi mulia ini secara resmi diakui setara dan sebanding dengan kelompok pekerja rentan lain yang sudah mendapatkan perlindungan APBD sebelumnya, seperti Ketua RT/RW atau Kader Surabaya Hebat. Komitmen ini secara konkret menjadikan jaminan sosial bagi Guru TPQ berhasil masuk dan teralokasikan dalam agenda penganggaran APBD 2024, membuktikan pengakuan nilai sosial profesi ini menjelang akhir tahun anggaran.

Meskipun proses pendaftaran telah terstruktur melalui koordinasi PAC, mekanisme pelaporan risiko klaim saat ini tercatat masih memiliki keterbatasan yang signifikan dalam sistem digitalisasi. Ketika terjadi risiko yang membutuhkan klaim manfaat (misalnya kasus kematian), pelaporan kasus oleh Guru TPQ atau perwakilan PAC saat ini masih dilakukan secara manual melalui penyampaian laporan langsung kepada Petugas Administrasi BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas di Program Khusus.

Realitas operasional yang ditemukan saat ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam mekanisme pelaporan kasus klaim. Berbeda signifikan dengan kelompok pekerja rentan lain di bawah perlindungan Pemkot Surabaya, seperti Kader Surabaya Hebat dan RT/RW, yang telah difasilitasi dengan akses sistem digital mandiri. Sistem digital ini memungkinkan mereka untuk melakukan pelaporan kasus (seperti kematian atau kecelakaan kerja) secara lebih efisien, transparan, dan tanpa harus melalui birokrasi tatap muka. Sebaliknya, proses pelaporan risiko klaim oleh Guru TPQ atau perwakilan PAC saat ini masih berlangsung secara manual, di mana laporan harus disampaikan langsung kepada Petugas BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun terdapat perbedaan yang berpotensi menghambat kecepatan pelayanan, komitmen tinggi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan yang didukung oleh koordinasi intensif melalui grup komunikasi digital dengan PAC memastikan bahwa setiap laporan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) yang responsif dan komunikasi yang adaptif menjadi mitigasi utama terhadap keterbatasan sistem teknologi yang belum terintegrasi sepenuhnya.

Pembuktian manfaat nyata program diwujudkan melalui penyerahan santunan JKM secara simbolis kepada ahli waris dalam sebuah acara publik yang strategis. Acara penyerahan santunan ini dilaksanakan bertepatan dengan Peringatan Hari Santri, sebuah momen yang dipilih untuk menegaskan dukungan pemerintah secara kultural dan keagamaan. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, termasuk Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Kepala Bapemkesra, dan Staf Ahli Walikota. Total 3 orang ahli waris menerima santunan, dengan nominal sebesar Rp72.000.000,- untuk satu santunan dan masing-masing Rp42.000.000,- untuk dua santunan lainnya, yang secara kuantitatif membuktikan kepastian manfaat finansial bagi keluarga yang ditinggalkan secara cepat dan tepat.



Gambar 1. Penyerahan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada Ahli Waris Guru TPQ pada Peringatan Hari Santri di Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Pihak-pihak Terkait Setelah Kegiatan Penyerahan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada Ahli Waris Guru TPQ.

Program perlindungan sosial ini berhasil menjangkau total 18.000 Guru TPQ di Surabaya. Keberhasilan ini didukung oleh dua faktor utama, yaitu dana iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh APBD Pemerintah Kota Surabaya dalam aspek keuangan dan bantuan pendampingan dari PAC FKPQI dalam aspek administrasi. Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa dan Pemerintah Kota Surabaya telah menciptakan



sistem perlindungan yang merangkul semua Guru TPQ serta memastikan Guru TPQ mendapatkan perlindungan nyata berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini sekaligus menjadi bukti konkret bahwa pemerintah secara resmi mengakui dan menghargai peran Guru TPQ Sebagai bagian dari kelompok pekerja rentan yang berhak mendapatkan jaminan sosial.

Pembahasan

Implementasi program perlindungan sosial bagi ribuan Guru TPQ di Surabaya melalui sosialisasi berjenjang yang memanfaatkan struktur PAC FKPQI dan pendekatan penjangkauan informal secara kuat membuktikan keberhasilan adopsi strategi *Community-Based Approach* yang sangat adaptif. Strategi ini dinilai sangat efektif karena didasarkan pada realitas sosiologis bahwa komunitas Guru TPQ cenderung menempatkan tingkat kepercayaan atau *trust* yang jauh lebih tinggi pada figur keagamaan internal mereka dibandingkan pada institusi birokrasi eksternal. Kesuksesan pendekatan ini terletak pada penggunaan perantara yang memiliki legitimasi moral dan otoritas keagamaan, yang berfungsi sebagai jembatan kredibilitas bagi BPJS Ketenagakerjaan. Implikasi dari strategi ini menegaskan bahwa dalam upaya memperluas cakupan jaminan sosial ke sektor informal yang berbasis komunitas, penggunaan modal sosial yang sudah ada jauh lebih efisien daripada membangun saluran komunikasi baru. Hal ini sekaligus memvalidasi pandangan bahwa resistensi terhadap asuransi sosial sering kali bukan disebabkan oleh penolakan terhadap konsep perlindungan itu sendiri, melainkan karena kurangnya kepercayaan terhadap pembawa pesan yang dianggap asing atau terlalu birokratis bagi kultur komunitas tersebut (Dalimunthe et al., 2024; Loise & Syukur, 2025; Mayantie et al., 2025).

Interpretasi terhadap metode penjangkauan yang dilakukan melalui acara-acara santai menunjukkan adanya fleksibilitas manajerial yang luar biasa dari pihak penyelenggara dalam mereduksi persepsi birokrasi kaku yang sering dihindari oleh pekerja sektor informal. Penggunaan momen kultural seperti kegiatan buka puasa bersama pada tahap awal program memungkinkan pesan mengenai urgensi perlindungan diterima sebagai sebuah nasihat sosial-religius yang persuasif dan penuh empati, bukan sekadar instruksi administratif yang bersifat *top-down*. Adaptasi budaya ini terbukti krusial dalam menumbuhkan kesadaran kolektif dan mempersiapkan mentalitas para Guru TPQ sebelum mereka memasuki fase pendaftaran yang lebih formal. Implikasinya, pendekatan humanis yang meleburkan batas-batas formalitas institusi dengan tradisi lokal mampu menciptakan ruang dialog yang konstruktif, meminimalisir kecurigaan, dan mempercepat penerimaan program (Fauzi & Salim, 2025; Fitri et al., 2024; Haratua et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di tingkat akar rumput tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi sangat bergantung pada kemasan komunikasi yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan kebiasaan sosial dari kelompok sasaran yang dituju (Kondolele et al., 2025).

Peran strategis PAC FKPQI sebagai penyedia pendampingan administratif menegaskan kembali mengenai pentingnya peran pendamping masyarakat atau *intermediaries* sebagai jembatan layanan yang vital dalam mengatasi hambatan teknis mendasar. Masalah yang sering dihadapi oleh pekerja informal yang rentan adalah kesulitan dalam navigasi proses birokrasi, pengumpulan dokumen, dan pengisian formulir yang kompleks akibat keterbatasan waktu, mobilitas, serta variasi tingkat literasi digital. Dengan adanya pendampingan intensif dari pengurus PAC, BPJS Ketenagakerjaan berhasil meminimalkan risiko kegagalan administratif yang meliputi isu krusial seperti ketidaklengkapan dokumen identitas, ketidakcocokan data kependudukan, hingga ketidakpahaman terhadap standar prosedur. Keberhasilan penyelesaian



pendaftaran massal terhadap 18.000 peserta dalam waktu singkat menjadi indikasi kuat bahwa intervensi komunitas terstruktur sangat efektif dalam menjamin konsistensi data. Model ini mengimplikasikan bahwa mobilisasi melalui jaringan komunitas internal jauh lebih efisien dari segi sumber daya dan waktu dibandingkan mengandalkan mekanisme pendaftaran mandiri yang sering kali gagal menjangkau pekerja informal yang tersebar luas secara geografis (Al-Amin, 2022; Lim et al., 2023).

Analisis mendalam terhadap struktur pembiayaan menunjukkan bahwa dukungan pendanaan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan elemen struktural yang paling fundamental dalam menjamin keberhasilan program ini. Pembiayaan iuran kolektif atau subsidi penuh ini secara efektif menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi tembok penghalang utama bagi pekerja keagamaan dengan pendapatan yang tidak tetap dan cenderung kecil. Keputusan fiskal ini menjamin inklusivitas program sejak awal, memastikan bahwa seluruh Guru TPQ tanpa terkecuali menerima hak perlindungan yang setara. Langkah ini mencerminkan realisasi konsep *Social Protection Floors* di tingkat lokal, di mana pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam menutup celah ketidakmampuan finansial warganya. Implikasinya, keberlanjutan kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi pekerja rentan sangat bergantung pada komitmen fiskal pemerintah, karena model kepesertaan mandiri sering kali mengalami tingkat kegagalan bayar yang tinggi akibat fluktuasi pendapatan peserta di sektor informal yang sangat dinamis (Kaiser et al., 2023; Mekarisce et al., 2022; Muttaqien et al., 2021).

Di sisi lain, analisis kontras mengenai mekanisme pelaporan risiko mengungkapkan adanya keterbatasan teknologi dan tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dalam jangka panjang. Temuan bahwa sistem pelaporan klaim bagi Guru TPQ masih dilakukan secara manual, berbeda signifikan dengan sistem digital mandiri yang telah dimiliki oleh kelompok binaan lain seperti pengurus lingkungan, menunjukkan adanya disparitas implementasi *e-governance* yang belum merata. Kesenjangan teknologi ini berpotensi menimbulkan risiko administratif berupa keterlambatan proses, inefisiensi waktu, dan potensi *human error* dalam rekapitulasi data klaim (Jagadhita, 2025; Lubis et al., 2024; Muttaqin, 2022). Namun, keterbatasan sistem manual ini terbukti berhasil dimitigasi secara efektif oleh militansi petugas dan soliditas jaringan komunikasi PAC. Kecepatan respon pelayanan klaim, meskipun melalui alur manual, tetap terjaga berkat intensitas komunikasi interpersonal melalui platform pesan digital. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam kondisi infrastruktur teknologi yang belum sempurna, faktor kualitas sumber daya manusia dan komitmen pelayanan yang responsif memegang peran vital sebagai penyangga utama untuk menjaga kepercayaan peserta dan memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi tepat waktu.

Pembuktian manfaat program melalui penyerahan santunan Jaminan Kematian secara simbolis pada momen peringatan keagamaan memiliki dimensi *symbolic politics* yang sangat signifikan dalam memperkuat legitimasi program. Acara yang dihadiri oleh pejabat tinggi daerah ini melampaui sekadar proses administratif pencairan dana, melainkan bertransformasi menjadi panggung validasi publik yang memperkuat narasi kebijakan pemerintah mengenai keberpihakan terhadap ulama dan guru ngaji. Penyerahan santunan dengan nominal yang substansial secara konkret membuktikan kepastian manfaat finansial, memberikan jaminan bahwa program ini bukan sekadar janji politik, tetapi sebuah jaring pengaman sosial yang riil. Dampak ekonominya sangat krusial dalam mencegah keluarga yang ditinggalkan jatuh ke dalam jurang kemiskinan mendadak akibat hilangnya tulang punggung keluarga. Kehadiran negara atau *state presence* dalam momen duka masyarakat ini berfungsi sebagai mekanisme



penguatan kepercayaan publik yang efektif, sekaligus menegaskan bahwa profesi Guru TPQ telah mendapatkan rekognisi yang setara dengan profesi formal lainnya dalam kerangka perlindungan negara.

Sebagai sintesis akhir, program ini merepresentasikan sebuah model kolaborasi tripartit yang terstruktur dan berhasil, melibatkan penyelenggara jaminan sosial, komunitas masyarakat sipil, dan pemerintah daerah. Sinergi ini terbukti mampu mengatasi tantangan klasik perluasan kepesertaan di sektor informal, yakni hambatan kepercayaan, kesulitan administrasi, dan ketidakmampuan finansial. Namun, sebagai implikasi masa depan, ketergantungan pada sistem pelaporan manual dan militansi personal petugas merupakan keterbatasan yang harus segera diatasi melalui transformasi digital. Rekomendasi utama dari pembahasan ini adalah perlunya pengembangan sistem automasi pelaporan yang terintegrasi bagi Guru TPQ untuk menjamin efisiensi jangka panjang yang tidak bergantung pada individu. Secara keseluruhan, model implementasi di Surabaya ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di wilayah lain, dengan catatan mutlak harus didukung oleh *political will* yang kuat dalam penganggaran daerah serta keberadaan struktur komunitas lokal yang solid dan militan seperti yang ditunjukkan oleh PAC FKPQI.

KESIMPULAN

Pengabdian ini menyimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil menjalankan peran pentingnya dalam memberikan perlindungan sosial kepada 18.000 Guru TPQ di Kota Surabaya. Keberhasilan program ini dicapai melalui strategi kolaborasi yang efektif. BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi secara bertahap kepada perwakilan komunitas (PAC FKPQI) untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Aspek terpenting dari program ini adalah dukungan penuh Pemerintah Kota Surabaya yang menanggung semua biaya iuran melalui APBD, memastikan semua Guru TPQ mendapatkan perlindungan tanpa perlu membayar iuran. Selain itu, keterlibatan aktif PAC sebagai penghubung di lapangan sangat membantu dalam proses pendataan dan pelaporan kasus. Bukti nyata manfaat program ditunjukkan melalui penyerahan santunan JKM secara simbolis, yang menegaskan pengakuan pemerintah terhadap peran Guru TPQ sebagai kelompok pekerja rentan.

Secara keseluruhan, model implementasi yang memadukan dana APBD dan koordinasi berbasis komunitas (PAC) ini merupakan studi kasus yang kuat dan berhasil dalam mengatasi hambatan finansial dan administrasi yang selama ini dialami pekerja informal. Program ini tidak hanya sekadar menyediakan asuransi, tetapi juga memperkuat rasa aman para guru dan memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ke depan, direkomendasikan agar program ini terus dikembangkan dengan cara menyempurnakan sistem pelaporan kasus klaim yang saat ini masih manual, menjadi sistem digital yang lebih cepat dan mandiri, seperti yang sudah diterapkan untuk kelompok pekerja lain di bawah Pemkot Surabaya. Selain itu, model kolaborasi sukses ini sangat berpotensi untuk diperluas guna menjangkau lebih banyak kelompok pekerja rentan lainnya di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Afwadzi, B., Susanto, M. H., Kurniawan, M. A. I. D., Ulatifa, F. M., Hasanah, A., & Darissalamah, N. (2023). Sosialisasi pola asuh anak yang tepat dan hak kebebasannya di Taman Pendidikan Al-Qur'an Sabilil Huda Desa Purworejo



- Ngantang Kabupaten Malang. *Bima Abdi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v3i1.264>
- Al-Amin, T. (2022). Peran modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri. *Realita Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 14(1), 49. <https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.234>
- Dalimunthe, I. S., Fitriasia, A., & Fatimah, S. (2024). Transformasi digital dan filsafat kepemimpinan dalam birokrasi: Tantangan dan peluang. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 597. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4006>
- Fauzi, H., & Salim, M. (2025). Manajemen konflik dalam tim edupreneur sebagai katalisator inovasi di MI. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 868. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7557>
- Fitri, A., Husna, A., Fahrimal, Y., & Syam, F. (2024). Maximizing public service through a humanistic communication approach. *Community Empowerment*, 9(3), 531. <https://doi.org/10.31603/ce.11064>
- Hafizd, J. Z. (2023). Strengthening religious moderation through education. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(2), 173. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i2.63>
- Haratua, C. S., Aslamiyah, S., Munawati, S., & Nugraha, Y. A. (2025). Efektivitas penerapan supervisi akademik oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1366. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.7995>
- Hariyadi, S., Athoillah, S., & Farhan, M. (2022). Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk mencetak kader ulama seperti lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan Pesantren. *Indonesian Journal of Community Services*, 4(2), 199. <https://doi.org/10.30659/ijocs.4.2.199-211>
- Hasanah, N., & Hamdan, A. M. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.662>
- Islakh, A. N., Pujianto, P., & Adibah, I. Z. (2025). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural. *LEARNING Jurnal Inovasi Pengabdian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 982. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.6440>
- Izyati, N. J., N.A., I. S. S. T., A., N. A., H., R. K., Aura, D., & D., A. R. (2023). The urgency of health insurance systems as safety education efforts for informal sector workers in garage. *Journal of Safety Education*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.15294/jse.v1i2.76200>
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap penerapannya. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1600. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12448>
- Kaiser, A. H., Rotigliano, N., Fleßa, S., Ekman, B., & Sundewall, J. (2023). Extending universal health coverage to informal workers: A systematic review of health financing schemes in low- and middle-income countries in Southeast Asia. *PLoS ONE*, 18(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288269>
- Kondolele, S., Sultan, M. I., Akbar, M., & Putra, B. A. (2025). The nexus between public communication and policy implementation revisited: Insights from the Population and Civil Registration Service of South Sulawesi, Indonesia. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1556747>



- Lim, I. Y., Eba, E., Bere, A. R., Keraf, M. P. S., Paulino, K. K., Fernandez, E., & Nani, P. A. (2023). Sistem informasi feeder data kependudukan berbasis mobile. *EDUMATIC Jurnal Pendidikan Informatika*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v7i1.12306>
- Loise, M., & Syukur, M. (2025). Analisis modal sosial dalam aktivitas ekonomi pedagang kuliner di Pasar Cidu' Kota Makassar. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1807. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7314>
- Lubis, S., Purnomo, E. P., Lado, J. A., & Hung, C.-F. (2024). Electronic governance in advancing sustainable development goals through systematic literature review. *Discover Global Society*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00102-3>
- Mayantie, R. D., Sugijati, S., Kiswati, K., & Kanarsih, I. G. A. (2025). Pengaruh penyuluhan tentang SHK dengan mediavideo terhadap kesediaan pemeriksaan SHK pada BBL di wilayah Puskesmas Puger. *HEALTHY Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 4(3), 376. <https://doi.org/10.51878/healthy.v4i3.7046>
- Mekarisce, A. A., Noerjoedianto, D., & Solida, A. (2022). Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1), 13. <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.548>
- Muttaqien, M., Setyaningsih, H., Aristianti, V., Coleman, H., Hidayat, M., Dhanalvin, E., Siregar, D. R., Mukti, A. G., & Kok, M. (2021). Why did informal sector workers stop paying for health insurance in Indonesia? Exploring enrollees' ability and willingness to pay. *PLoS ONE*, 16(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252708>
- Muttaqin, M. Z. (2022). Ilham: E-Governance. *Drustvena Istrazivanja*, 31(2), 370. <https://doi.org/10.5559/di.31.2.10>
- Parnawi, A., Idris, A., Zufriyatun, Z., & Rafiqi, R. (2024). Innovation in the development of Islamic religious education with a multicultural approach. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(1), 231. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.589>
- Primayekti, R., Septuri, S., & Supriadi, N. (2024). Pengaruh manajemen sumberdaya manusia (guru Qur'an) terhadap kompetensi profesional guru Qur'an serta dampaknya pada keberhasilan pembelajaran tahsin dan tahfidz di TPQ Ad Du'a. *LEARNING Jurnal Inovasi Pengabdian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 926. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3412>
- Sibagariang, S. A., Sinaga, A. T. I., & Purba, A. A. (2024). Penerapan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam peningkatan mutu guru YP. HKBP Pematangsiantar. *LEARNING Jurnal Inovasi Pengabdian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 949. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3410>
- Sudrajat, T. (2020). Perlindungan hukum dan pemenuhan hak pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>